



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor : 011/Humas-KH/III/2016

Mendorong Media Film Untuk Membangun Rekonsiliasi Anak Bangsa

Pengungkapan dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu masih menjadi persoalan di Indonesia. Hal ini berakibat pada terlanggarnya hak atas kebenaran, hak atas keadilan, maupun hak atas pemulihan dari korban atau keluarga korban. Berbagai upaya terus dilakukan Komnas HAM untuk mengungkapkan maupun mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat ini.

Salah satunya adalah melalui penyebaran informasi terkait HAM yang sebenarnya ditujukan untuk menjaga momentum agenda bangsa dalam penyelesaian persoalan HAM di Indonesia. Penting untuk mengingatkan pemerintah dan seluruh elemen bangsa agar tidak lupa akan arti pentingnya proses pemajuan, penegakan dan penyelesaian pelanggaran HAM sebagai agenda mendesak yang harus diwujudkan.

Berdasarkan pasal 6 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM dinyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia harus memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta media baru, untuk memajukan semua aspek hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Komnas HAM mendukung film untuk dijadikan media pembelajaran, penyadaran dan pendidikan masyarakat khususnya dalam upaya membangun rekonsiliasi antar anak bangsa dan turut membantu pelaksanaan mandat Komnas HAM sebagaimana diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yakni penyebaran HAM di seluruh masyarakat dan penuntasan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu sesuai UU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM sangat menyayangkan peristiwa hari ini dan merasa perlu untuk memberikan respon karena kejadian yang sangat disayangkan banyak pihak ini, seolah telah mengembalikan semangat orde baru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Goethe-Institute terpaksa membatalkan pemutaran film "**Pulau Buru Tanah Air Beta**" hari ini (Rabu, 16 Maret 2016), setelah diinformasikan oleh pihak Kepolisian akan adanya demonstrasi massa dari ormas yang tidak setuju dengan acara ini.

Pihak Kepolisian Sektor Menteng tidak secara langsung meminta membatalkan pemutaran film, namun alasan akan adanya aksi massa yang menentang telah kerap kali digunakan dan sesungguhnya mencerminkan keberpihakan Kepolisian kepada ormas-ormas tertentu yang sering mengancam dan menggunakan pendekatan anarkisme.

Film yang baru akan diputar untuk pertama kali ini bercerita tentang fakta sejarah terkait Pulau Buru yang sempat digunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik. Film ini dibuat untuk membuka mata generasi muda tentang apa yang pernah terjadi di negara ini, agar mereka bisa mengetahui kontribusi Penyintas/ *Survivor*/ Korban yang selamat dalam memajukan bangsa, mempelajarinya dan tidak mengulang kesalahan serupa di kemudian hari.

Bukan sebaliknya, negara justru mengkriminalisasi mereka. Ketakutan untuk mengetahui sejarah kelam masa lalu, membuktikan bagaimana hegemoni penguasa terhadap sejarah masih terjadi.

Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia yang antara lain mensyaratkan jaminan atas kebebasan berpikir dan berpendapat sebagaimana diatur dalam UU No.39/1999. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2009 Pasal 3, tujuan perfilman antara lain, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya harkat dan martabat bangsa.

Pemutaran film juga dalam rangka mengingatkan memori bangsa bagi pentingnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Merupakan upaya membangun kesadaran melakukan rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Tap MPR No.V/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Rakyat yang memandatkan upaya penegakan "kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau".

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 16 Maret 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan,



CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)